

**PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK UNTUK
MASYARAKAT MULTIKULTURAL (Studi Implementasi Kebijakan
Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)**

Oleh Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian implementasi kebijakan resolusi konflik di Sampit Kalimantan Tengah untuk menghasilkan model kebijakan resolusi konflik multikultural yang bersifat permanen di Poso Sulawesi dan Ambon Maluku. Dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi untuk menyelesaikan konflik multikultural di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya serta pengimplementasian model.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif-naturalistik. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh dari etnis yang berkonflik di Kalimantan Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik; wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dipadukan dengan desain *focus group discussion* (FGD) terutama dalam mencari akar persoalan konflik antar etnis dan merumuskan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan (dalam dua tahun), pertama meneliti akar-akar persoalan konflik etnis, menyusun kerangka model penyelesaian bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya atas konflik etnis. Tahap kedua implementasi model.

Hasil tahun pertama penelitian ini: *Pertama*, penyelesaian konflik di Sampit melalui Kebijakan Publik dalam bentuk perda secara partisipatif, dengan inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, dan tekad kultural untuk hidup berdampingan secara damai telah menghasilkan penyelesaian konflik dengan tingkat keberhasilan yang secara relatif jauh lebih berhasil daripada Konflik Poso dan Ambon. Penyelesaian konflik di Ambon dan Poso belum sepenuhnya berhasil dan secara relatif berada di bawah tingkat keberhasilan penyelesaian Konflik Sampit. Konflik di Poso dan Ambon melibatkan inisiatif pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sangat besar, bersifat *top-down* dan dipungkasi dengan pemilahan secara eksklusif aspek-aspek sosio-ekonomi dan domisili pihak-pihak yang berkonflik. *Kedua*, model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan melalui belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi. Filosofi pendekatan ini adalah partisipatori, *from-bottom-initiative*, kebijakan publik sebagai mekanisme payung, inklusif, dan *peaceful co-existence*.

Kata kunci: *Konflik multikultural, resolusi konflik, politik rekognisi, kebijakan publik*

Abstract

This research aims to conduct a study on implementation of conflict resolution policy in Sampit in Central Kalimantan and to produce a model of permanent multicultural conflict resolution policy towards conflict of Poso and Ambon. In this research, the model of conflict resolution is constructed on the basis of the politics of recognition to resolve multicultural conflict in the political aspect, legal, economic, social, and cultural as well.

The research was conducted using qualitative-naturalistic method. Subjects of research are figures of the ethnic conflict in Sampit, Central Borneo. Collecting data techniques occupy in-depth interview, documentation, observation, which are combined with the design of focus group discussion (FGD), especially in the search for root causes ethnic conflict, and also to formulate conflict resolution model which bases on politics of recognition. The study was conducted in two stages (within two years): firstly, to examine the root causes ethnic conflict, and to make a framework for the resolution model of political, legal, economic, social, cultural aspect over ethnic conflict. The second phase is to implement the model.

The results of research in the first year are: *First*, the conflict resolution in Sampit in the form of public policy which is participatory, based on cultural initiatives from below, and cultural determination to live in a peaceful-coexistence has resulted a conflict resolution with higher fruitfulness than conflict resolution in Poso and Ambon. Conflict resolution in Ambon and Poso has not been fully successful and relatively lower than the success of conflict resolution in conflict of Sampit. The conflict resolution initiatives in Poso and Ambon involve a large role of local government and central government, qualify a top-down design, and end with an exclusive sorting toward several aspects of socio-economic of parties, and domicile of the conflict parties as well. *Second*, a model of permanent multicultural conflict resolution which is learned from the conflicts in the three regions is a conflict resolution model based on politics of recognition approach. The philosophy of this approach are: 1) participatory, 2) from a bottom-up initiative, 3) public policy as an umbrella mechanism, 4) inclusive, and 5) peaceful co-existence.

Keywords: *Multicultural conflict, conflict resolution, politics of recognition, public policy*